

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gemuh Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini.

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal berdasarkan pada Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2025 yaitu Menuju Kendal Inclusive 2026 melalui Pemerataan Pembangunan dan Perekonomian.

Penetapan Kinerja Tahun 2026 ini mendeskripsikan bagaimana capaian kinerja yang hendak diwujudkan oleh Kecamatan Gemuh pada tahun 2026 sesuai dengan Rencana Strategik yang telah ditetapkan. Melalui instrumen ini diharapkan dapat mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam membangun pemerintahan yang baik dan terpercaya berdasarkan prinsip-prinsip good governance.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Gemuh Tahun 2026 ini masih banyak kelemahan dan kekurangan namun setidaknya dapat menjadi bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan sebagai tugas pokok dan fungsi Camat serta dapat menjadi bahan kajian yang bermanfaat bagi upaya peningkatan penyelenggaraan kegiatan yang akan datang.

Demikian dan semoga dokumen ini dapat menjadi bahan masukan serta informasi yang berguna bagi pengambil keputusan (decision maker) dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Gemuh, 06 Mei 2025
CAMAT GEMUH

KARTINI, S. STP., M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 197807041997031002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah Kecamatan Gemuh mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah yang disusun untuk mewujudkan visi misi Pemerintah Kabupaten Kendal seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gemuh Tahun 2021 – 2026 yang merupakan salah satu bahan dari SKPD yang akan digunakan untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun 2026 yang telah disusun dengan mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen dasar digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Gemuh tahun 2026 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan

Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Gemuh sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2026 ini menyusun Rencana Kerja Tahun 2026. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya..

1.2 Landasan hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerahKabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nom104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 17).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Tahun 2026 adalah tersusunnya dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Kecamatan Gemuh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 2026.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gemuh Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Gemuh dalam menentukan prioritas Program dan Kegiatan Tahun 2026.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Gemuh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.

3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Gemuh untuk memahami Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Operasional Tahun 2026, dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja.
4. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Gemuh tahun 2026 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2026;
5. Menjabarkan tentang gambaran umum daerah sekarang dan yang ingin dicapai pada tahun 2026 kedepan sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapinya misi dan visi kepala daerah;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini memuat gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Pada bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun lalu berjalan (n-1) dan capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sampai dengan output sub kegiatan tahun 2024, serta faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi

target kinerja tersebut; Kajian capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah disampaikan faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja tersebut; Prestasi yang dicapai pada tahun 2024; Isu-isu penting/strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi; Reviu terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan; serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Pada bab ini memuat :

1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan kebijakan provinsi

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah;

3. Program dan kegiatan berupa penjelasan mengenai:

- Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, baik mengenai jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi sub kegiatan, total kebutuhan dana/pagu yang dirinci menurut sumber pendanaannya;
- Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis

program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya;

4. Inovasi Perangkat Daerah:

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah beserta dana yang dibutuhkan

Bab V : Penutup

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Gemuh. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gemuh menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Gemuh selama Tahun 2024 dan tahun berjalan 2025 serta perkiraan target anggaran Tahun 2026. Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gemuh Tahun 2024 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2024 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Adapun gambaran lebih lengkap mengenai realisasi pencapaian kinerja Kecamatan Gemuh Tahun Anggaran 2024 berdasarkan evaluasi pengukuran kinerja kegiatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.	Pagu Anggaran	:	Rp. 4.837.027,-
	Realisasi Anggaran	:	Rp. 4.083.000,-
	Realisasi Anggaran	:	84,42 %
2.	Indikator kinerja capaian	:	Jumlah
	tersusunnya		
	keluaran		dokumen perencanaan Perangkat Daerah
3.	Target capaian kegiatan	:	8 Dokumen
4.	Realisasi capaian kegiatan	:	6 dokumen
5.	Tingkat capaian kinerja	:	100%

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

1.	Pagu Anggaran	:	Rp. 2.000.000,-
	Realisasi Anggaran	:	Rp. 1.304.000,-
	Realisasi Anggaran	:	65,2 %
2.	Indikator kinerja capaian	:	Jumlah tersusunnya
	keluaran		dokumen perencanaan Perangkat Daerah
3.	Target capaian kegiatan	:	8 Dokumen
4.	Realisasi capaian kegiatan	:	5 dokumen
5.	Tingkat capaian kinerja	:	100%

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 1 sub kegiatan.

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,

1.	Pagu Anggaran	:	Rp. 2.044.247.293,-
	Realisasi Anggaran	:	Rp. 1.786.195.922,-
	Realisasi Anggaran	:	87,38 %
2.	Indikator kinerja capaian	:	Jumlah bulan terbayarnya
	keluaran		gaji dan tunjangan ASN.
3.	Target capaian kegiatan	:	14 bulan
4.	Realisasi capaian kegiatan	:	14 bulan
5.	Tingkat capaian kinerja (%).	:	100%

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor

1. Pagu Anggaran : Rp.1.895.000,-
Realisasi Anggaran : Rp.1.858.000,-
Realisasi Anggaran : 98,11 %
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah bulan tersediannya
keluaran alat listrik/ penerangan
bangunan.
3. Target capaian kegiatan : 12 bulan
4. Realisasi capaian kegiatan : 12 bulan
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1. Pagu Anggaran : Rp.11.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp.10.917.000,-
Realisasi Anggaran : 99,24 %
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah bulan tersedianya alat
keluaran tulis kantor dan pengadaan
3. Target capaian kegiatan : 12 bln
4. Realisasi capaian kegiatan : 12 bln
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1. Pagu Anggaran : Rp.2.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp.1.628.400,-
Realisasi Anggaran : 81,42 %
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah bulan penyediaan
keluaran peralatan rumah tangga
3. Target capaian kegiatan : 12 bln
4. Realisasi capaian kegiatan : 12 bln
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1. Pagu Anggaran : Rp.19.964.000,-
Realisasi Anggaran : Rp.14.634.500,-
Realisasi Anggaran : 73,31 %
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah tersedianya logistik
keluaran dan makan minum
rapat/tamu.
3. Target capaian kegiatan : 12 bln
4. Realisasi capaian kegiatan : 12 bln
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp.5.000.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp.5.000.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | 100 % |
| 2. Indikator kinerja capaian | : | Jumlah bulan penyediaan keluaran cetak dan penggandaan |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 12 bln |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 12 bln |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : | 100% |

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp. 1.800.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp. 1.800.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | 100 % |
| 2. Indikator kinerja capaian | : | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perpu |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 12 bln |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 12 bln |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : | 100% |

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp.58.215.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp 37.298.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | 64,07 % |
| 2. Indikator kinerja capaian | : | Jumlah kegiatan koordinasi/konsultasi dalam/luar daerah dan tersedianya kebutuhan bbm |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 12 bln |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 12 bln |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : | 100% |

h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp.2.299.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp.2.221.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | 96,61 % |
| 2. Indikator kinerja capaian | : | Ketercapaian dalam penatausahaan Arsip |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 12 bln |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 12 bln |

5. Tingkat capaian kinerja (%) : 100%

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

- | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------|--------|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp.2.000.000,- | |
| Realisasi Anggaran | : | Rp.2.000.000,- | |
| Realisasi Anggaran | : | 100 % | |
| 2. Indikator kinerja capaian | : | Tersedianya sarana | urusan |
| keluaran | : | prasarana pemerintahan daerah | |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 12 bln | |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 12 bln | |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : | 100% | |

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa surat menyurat

- | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp.2.000.000,- | |
| Realisasi Anggaran | : | Rp.2.000.000,- | |
| Realisasi Anggaran | : | 100 % | |
| 2. Indikator kinerja capaian | : | Persentase penyediaan | |
| keluaran | : | jasa penunjang urusan | |
| | : | pemerintahan daerah | |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 12 bln | |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 12 bln | |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : | 100% | |

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik

- | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|--|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp.40.800.000,- | |
| Realisasi Anggaran | : | Rp.38.216.827,- | |
| Realisasi Anggaran | : | 93,66 % | |
| 2. Indikator kinerja capaian | : | Jumlah bulan belanja | |
| keluaran | : | rekening listrik, air dan | |
| | : | telpon | |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 100 % | |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 100 % | |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : | 100 % | |

c. Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp.105.000.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp.103.646.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | 98,72 % |
| 2. Indikator kinerja capaian keluaran | : | Belanja jasa peralatan perlengkapan kantor |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 12 bln |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 12 bln |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%). | : | 100% |

d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp.80.560.007,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp.80.520.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | 99,95 % |
| 2. Indikator kinerja capaian keluaran | : | Belanja jasa tenaga penunjang kegiatan kantor |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 12 bln |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 12 bln |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%). | : | 100% |

6. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp.5.835.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp.4.734.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | 81,14 % |
| 2. Indikator kinerja capaian keluaran | : | Tercukupinya jumlah dan pembayaran Pajak pemeliharaan |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 12 Unit |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 12 Unit |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%). | : | 100 % |

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp.7.000.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp.6.297.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | 89,96 % |
| 2. Indikator kinerja capaian keluaran | : | Prosentase ketercapaian dalam pemeliharaan peralatan dan mesin |

3. Target capaian kegiatan : 12 bln
4. Realisasi capaian kegiatan : 12 bln
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

c. Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1. Pagu Anggaran : Rp.2.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp.1.586.000,-
Realisasi Anggaran : 79,3 %
2. Indikator kinerja capaian keluaran : Prosentase gedung yang dipelihara
3. Target capaian kegiatan : 3 Unit
4. Realisasi capaian kegiatan : 3 Unit
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

untuk kegiatan ini ada 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Di Kecamatan

a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan:

1. Pagu Anggaran : Rp.25.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp.22.730.000,-
Realisasi Anggaran : 90,92 %
2. Indikator kinerja capaian keluaran : Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa
3. Target capaian kegiatan : 18 dokumen
4. Realisasi capaian kegiatan : 16 dokumen
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, kegiatan ini ada 3 sub kegiatan:

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;

1. Pagu Anggaran : Rp.6.136.000,-
Realisasi Anggaran : Rp.5.725.000,-
Realisasi Anggaran : 93,31 %
2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah desa yang difasilitasi dalam forum musrenbang.
3. Target capaian kegiatan : 12 desa
4. Realisasi capaian kegiatan : 12 desa
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

b. Sinkronisasi Program Kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintahan dan Swasta Di Wilayah Kerja Kecamatan

1. Pagu Anggaran : Rp.2.660.000,-
Realisasi Anggaran : Rp.720.000,-
Realisasi Anggaran : 27,07 %
2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah terselenggaranya kegiatan pemberdayaan oleh pemerintah dan swasta
3. Target capaian kegiatan : 1 kegiatan
4. Realisasi capaian kegiatan : 1 kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

c. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan:

1. Pagu Anggaran : Rp.44.525.000,-
Realisasi Anggaran : Rp.40.460.000,-
Realisasi Anggaran : 90,88 %
2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah desa yang difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan perempuan
3. Target capaian kegiatan : 18 desa
4. Realisasi capaian kegiatan : 18 desa
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan sub Kegiatan:

a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

1. Pagu Anggaran : Rp.23.940.000,-
Realisasi Anggaran : Rp.22.480.000,-
Realisasi Anggaran : 93,90 %
2. Indikator kinerja capaian keluaran : Prosentase kasus konflik yang ditangani
3. Target capaian kegiatan : 18 Desa
4. Realisasi capaian kegiatan : 18 Desa
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

2. Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pagu Anggaran : Rp.75.600.000,-
Realisasi Anggaran : Rp.75.600.000,-
Realisasi Anggaran : 100%
2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah koordinasi yang dilaksanakan
3. Target capaian kegiatan : 12 kali
4. Realisasi capaian kegiatan : 12 kali
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional

1. Pagu Anggaran : Rp.1.400.000,-
Realisasi Anggaran : Rp.0,-
Realisasi Anggaran : 0%
2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah desa yang difasilitasi dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
3. Target capaian kegiatan : 100 %
4. Realisasi capaian kegiatan : 0 %
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

1. Pagu Anggaran : Rp.24.396.000,-
Realisasi Anggaran : Rp.24.030.000,-

Realisasi Anggaran	:	98,50 %	
2. Indikator kinerja capaian keluaran	:	Prosentase penyusunan tepat waktu	APBDes
3. Target capaian kegiatan	:	100 %	
4. Realisasi capaian kegiatan	:	98 %	
5. Tingkat Capaian Kinerja (%)	:	100%	

Adapun Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya serta tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada **Tabel T-C.29** berikut:

Tabel T-C 29.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Kendal**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Gemuh

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	)Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	98	100	96	96	100	100	100
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian kinerja keuangan perangkat daerah	100	89,3	100	96	96	100	100	100
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	0	0	0	100	100	100
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase capaian kegiatan pengadaan barang milik daerah	100	100	100	99	99	100	100	100

7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemenuhan jasa penunjang	100	100	100	96	96	100	100	100
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	100	98,6	100	100	100	100	100	100
7	01	01	2.13	Penataan Organisasi	Prosentase capaian kegiatan peningkatan kinerja	100	98,6	100	100	100	100	100	100
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN	Prosentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	100	100	100	94	94	100	100	100
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	16 kali	16 kali	100	94	94	100	100	100
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 kali	12 kali	100	100	100	100	100	100

7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi dengan Satpol PP	12 kali	12 kali	100	100	100	100	100	100
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase penyusunan APBDes tepat waktu	100	100	100	90	90	100	100	100
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pembinaan, pengawasan pemerintahan desa	16 Desa	16 Desa	100	90	90	100	100	100

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Semua program dan kegiatan tahun 2024 telah terealisasi sesuai dengan target yang diusulkan (100%) secara fisik, dan realisasi anggaran tercapai 96 %

2. Realisasi program/kegiatan tahun 2024 yang terealisasi sesuai dengan target kinerja 100% dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah.

No	Program/Keg/ Sub Keg	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Perse ntase
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpenuhinya layanan umum,kepegawaian dan keuangan perangkat Daerah	100	96	96
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	160 dok	160 dok	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan triwulanan/semesteran	160 dok	160 dok	100
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja keuangan perangkat daerah	100	96	96
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	96
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pengelola keuangan	5 orang	4 orang	88
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100	100	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	12	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	12	100

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan cetakan dan penggandaan	bulan barang dan	12	12	100
--	---	---	------------------------	----	----	-----

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perpu	12	12	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan BBM dan perjalanan dinas	12	12	100
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	99	99
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	2 unit	2 unit	99
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	96	96
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah belanja materai	500	500	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan belanja rekening listrik, air dan telpon	12	12	89
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan peralatan kantor	12	12	94
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja jasa tenaga penunjang kegiatan kantor	2 orang	2 orang	100
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang di rehab dan diperbaiki	2 unit	2 unit	100
g	Penataan Organisasi	Prosentase terpenuhinya pelayanan umum	100	100	100
	Peningkatan Kinerja dan Birokrasi	Jumlah peserta sosialisasi	60 orang	60 orang	100
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100	100	100
a	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan	100	100	100

	Dilimpahkan kepada Camat	yang dilimpahkan			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dokumen perijinan	100	100	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	100	94	94
a	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	16	16	94
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang mengikuti kegiatan musrenbang	16	16	89
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Monitoring dan evaluasi kegiatan efektifitas pemberdayaan masyarakat desa	16	16	99
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan dan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100	100	100
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	12	12	100
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang dimonitor	16	16	100
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi	50 orang	50 orang	100
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	Jumlah tenaga linmas dan peserta pembinaan linmas	50 orang	50 orang	100

	Republik Indonesia				
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100	90	90
a	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	16	16	90
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah APBDes yang disusun	16	16	90
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	16	16	86
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	16	16	90
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	16	16	100
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	16	16	100

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya / terpenuhinya target kinerja program/kegiatan.

- Adanya reconfusing anggaran mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana atau capaian kinerja tidak maksimal;
- Keterbatasan SDM dengan volume kegiatan yang kurang seimbang mempengaruhi hasil kinerja
- Keterbatasan fasilitas dan fasilitasi dari dinas terkait sehingga kegiatan dilaksanakan dengan memaksimalkan SDM yang tersedia untuk dapat mencapai hasil yang maksimal
- Adanya regulasi kebijakan yang berubah-ubah dalam waktu yang singkat sehingga melaksanakan program dan

kegiatan mengalami perubahan yang terjadi dengan memakan waktu yang lama.

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD.

Target capaian program Renstra tahun 2021-2026 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja (renja) sehubungan dengan perkembangan kebutuhan baik dari segi anggaran maupun kegiatan di wilayah.

5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut adalah;

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada prioritas kegiatan sesuai visi misi daerah dan memaksimalkan anggaran yang tersedia.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Semua program dan kegiatan tahun 2023 telah terealisasi sesuai dengan target yang diusulkan (100%) secara fisik, dan realisasi anggaran tercapai 88,32 %

2. Realisasi program/kegiatan tahun 2023 yang terealisasi sesuai dengan target kinerja ada 88,32%.

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya / terpenuhinya target kinerja program/kegiatan :

- Adanya reconfusing anggaran mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana atau capaian kinerja tidak maksimal;
- Keterbatasan SDM dengan volume kegiatan yang kurang seimbang mempengaruhi hasil kinerja

- Keterbatasan fasilitas dan fasilitasi dari dinas terkait sehingga kegiatan dilaksanakan dengan memaksimalkan SDM yang tersedia untuk dapat mencapai hasil yang maksimal
- Adanya regulasi kebijakan yang berubah-ubah dalam waktu yang singkat sehingga pelaksanaan program dan kegiatan mengalami perubahan yang terjadi dengan memakan waktu yang lama.

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD.

Target capaian program Renstra tahun 2021-2026 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja (renja) sehubungan dengan perkembangan kebutuhan baik dari segi anggaran maupun kegiatan di wilayah.

5. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program / kegiatan lebih difokuskan pada prioritas kegiatan sesuai visi misi daerah dan memaksimalkan anggaran yang tersedia

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal. Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Ayat (1) Pasal 3 Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021:

- 1) Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:
 - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa /Kelurahan dan Kecamatan;
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;

4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, meliputi :
5. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang – undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
6. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat Kecamatan, meliputi:
 1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. Efektivitas penyelenggaraan, kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati
- f. Membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- g. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan, meliputi:
 1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

2. Fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturanperundang-undangan.
- 2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1),Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati :
 - a. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - b. Untuk melaksanakan tugas pembantuan.
 - 3) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - 4) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada yat (3) dilaksanakan dengan kriteria proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleksdan tidak memerlukan teknologi tinggi.
 - 5) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pelayanan terpadu dan dikembangkan sebagai inovasi pelayanan public sesuai dengan ketentuan peraturan – undangan;
 - 6) Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan kriteria berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan berskala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
 - 7) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) sampai denganayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan public sesuai dengan karakteristik Kecamatan/atau kebutuhan masyarakat setempat.

8) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- h. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, lebih detail tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Kecamatan Gemuh Tahun 2022 sebagaimana dilihat di dalam **Tabel T-C.30** berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gemuh
Kabupaten Kendal

		SPM/standar		Target Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Capaian	Proyeksi	

		nasional		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Catatan
NO (1)	Indikator (2)	(3)	IKK (4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks reformasi birokrasi	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel	Nilai SAKIP	70	73	75	80	0	0	75	80	
		Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Nilai rata-rata IKM	87	88	89	90	91,2	0	89	90	

2.3 Prestasi Yang Dicapai Tahun 2023

Dalam kurun waktu tahun 2023 Kecamatan Gemuh memperoleh beberapa prestasi, sebagai berikut :

1. Juara 1 Terbaik kreasi TPP PKK
2. Juara II pilot projek penurunan angka stunting TP PKK

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gemuh tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Gemuh, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gemuh sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Belum optimalnya koordinasi (Trantibum, Penegakan perda, Pemerintahan vertikal di Wilayah Kecamatan)
2. Belum optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3. Belum optimalnya Pelayanan Publik dan Pelayanan Perijinan
4. Belum optimalnya Pemanfaatan dan Penataan Aset Daerah/BMD untuk Pelayanan Publik
5. Belum optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pendampingan Musrenbang, Evaluasi RAPBDes, Pembentukan BUMDES)
6. Belum optimalnya pencapaian target-target dalam Perencanaan Pembangunan dalam Renstra Petrangkat Daerah

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Renja Kecamatan Gemuh disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD. Mengingat keterbatasan kapasitas keuangan berdasarkan perhitungan proyeksi kondisi keuangan Kabupaten Kendal pada rancangan awal RKPD, maka ada beberapa kegiatan/sub kegiatan pada Renja Kecamatan Gemuh 2025 yang dikurangi ataupun dihilangkan anggarannya. Untuk lebih jelasnya review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 Kecamatan

Gemuh Kabupaten Kendal dapat dijelaskan melalui **Tabel T-C.31** berikut

Tabel T-C. 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Kendal

Nama OPD : Kecamatan Gemuh

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp 2.671.305.283,-	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp 2.996.089.223,-	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Gemuh	Prosentase unit kerja yang terlayani (%)	100	2.671.305.283,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kec. Gemuh	Prosentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah (%)	100	2.996.089.223,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Gemuh	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun	100	3.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Gemuh	Prosentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100	7.662.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Gemuh	Prosentase ketercapaian kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	100	2.304.846.283,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Gemuh	Prosentase capaian kinerja keuangan perangkat daerah	100	2.285.869.893,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Gemuh	Tercukupinya pakaian dinas beserta kelengkapannya	17 Paket	5.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Gemuh	Tercukupinya pakaian dinas beserta kelengkapannya	100	18.300.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Gemuh	Prosentase capaian kinerja administrasi umum perangkat	100	141.969.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Gemuh	Prosentase capaian kinerja administrasi umum perangkat	100	210.143.600,00	

			daerah yang dilaksanakan					daerah yang dilaksanakan			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Gemuh	Jumlah aset yang diadakan	100	1.500.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				45.982.500,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Gemuh	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	100	107.970.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Gemuh	Prosentase pemenuhan jasa penunjangurusan Pemerintah Daerah yang dilaksanankn	100	174.505.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Gemuh	Prosentase capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah yang terpelihara	100	25.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Gemuh	Prosentase capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah yang terpelihara	100	58.195.630,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Gemuh	Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100	700.000,00	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Gemuh	Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100	9.000.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Gemuh	Prosentase ketercapaian terselenggaranya koordinasi kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Gemuh	Prosentase ketercapaian terselenggaranya koordinasi kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	800.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Kec. Gemuh	Prosentase Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100	700.000,00	Pelakssanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Kec. Gemuh	Prosentase Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100	8.200.000,00	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN	Kec. Gemuh	Prosentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD (Musrenbang)	100	14.500.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN	Kec. Gemuh	Prosentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD (Musrenbang)	100	52.291.800,00	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Gemuh	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Lembaga Kemasyarakatan)	100	13.000.000,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Gemuh	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Lembaga Kemasyarakatan)	100	52.291.800,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Gemuh	Jumlah laporan kegiatan koordinasi pemberdayaan desa	100	1.500.000,00						
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100	64.120.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Gemuh	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100	107.812.000,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		jumlah koordinasi yang dilaksanakan	100	63.820.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Gemuh	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	100	13.132.000,00	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		jumlah koordinasi yang dilaksanakan	100	300.000,00	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Gemuh	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	100	94.680.000,00	

	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Gemuh	Prosentase tercapainya kegiatan bimtek	100	0	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Gemuh	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100	9.126.800,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Gemuh	Prosentase terpenuhinya Koordinasi dan Bimtek	100	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Gemuh	Prosentase jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	100	9.126.800,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Gemuh	Prosentase kasus konflik sosial yang di tangani	100	2.700.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Gemuh	Prosentase penyusunan APBDes	100	17.200.000,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Gemuh	Jumlah kasus konflik yang ditangani dibagi kasus konflik yang terjadi	100	2.700.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Gemuh	Jumlah desa yang difasilitasi pembinaan, pengawasan pemerintahan desa	100	17.200.000,00	

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 tidak memasukkan usulan dari masyarakat yang disampaikan lewat kegiatan Musrenbangcam, karena program/kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan bersifat rutin dan tugas pokok yang dilakukan bersifat koordinatif dan pembinaan. Sedangkan usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat bersifat fisik.

Usulan yang berasal dari masyarakat tersebut selanjutnya ditampung dalam Daftar Usulan Prioritas Kegiatan yang kemudian disampaikan dalam Musrenbangkab. Program/kegiatan yang berasal dari masyarakat tersebut diperjuangkan dan dikawal oleh Tim Kecamatan agar masuk dalam program/kegiatan prioritas di OPD teknis terkait yang ada di Kabupaten Kendal

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Propinsi

Arah Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan Nasional adalah pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana Nasional pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025 yang merupakan masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045 sekaligus penjabaran awal dari RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. Rencana Kerja Pemerintah 2025 mempunyai tema RKP 2025 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasisi Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.

6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi , Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi,dan Penyelundupan.
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, sertaMeningkatkan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.

Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah tidak lepas dari prioritas pembangunan provinsi jawa tengah. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 diarahkan pada:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif;

Arah Kebijakan Kabupaten Kendal

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 adalah “**Kendal Inclusive**” dengan prioritas “**Mewujudkan Pembangunan Daerah Dan Ekonomi Yang Merata Dengan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Yang Mantap Dan Berkeadilan**”. Arah kebijakan ini dengan fokus pada penguatan kualitas jalan, ketahanan daerah dalam penanganan bencana, peningkatan kualitas lingkungan terutama

pengelolaan sampah yang terintegrasi, dan peningkatan layanan angkutan jalan yang terintegrasi.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 ditekankan pada:

1. Memperkuat kualitas jalan melalui peningkatan kelas jalan, dan peningkatan pemeliharaan jalan;
2. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanganan bencana;
3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
4. Meningkatnya pengelolaan sampah;
5. Meningkatnya layanan angkutan jalan;
6. Meningkatnya ketahanan pangan;
7. Menurunnya kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka;
8. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia;

Prioritas Kabupaten Kendal

Adapun Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2025 di antaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata.
 - a. Mendorong peningkatan kualitas dan keterpaduan infrastruktur;
 - b. Mendorong infrastruktur layak anak, lansia dan difabel;
 - c. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan, drainase melalui pembangunan dan rehabilitasi;
 - d. Peningkatan kualitas irigasi melalui pembangunan rehabilitas irigasi sekunder sesuai kewenangan daerah;
 - e. Peningkatan akses air minum dan akses limbah domestik melalui peningkatan pembangunan sambungan langsung rumah, peningkatan PAMSINAS dan SANIMAS, pelayanan air minum dan penangan limbah sesuai SPM;
 - f. Peningkatan penanganan Kumuh melalui peningkatan kualitas PSU di kawasan kumuh, pembangunan RTLH di daerah kumuh

dan luar kumuh dalam rangka pencegahan kumuh, pembangunan RTLH sesuai dengan SPM;

g. Peningkatan pembangunan sesuai dengan RTRW melalui peningkatan pemahaman, peningkatan informasi RTRW dan penegakan perda RTRW;

h. Meningkatnya konektivitas antar wilayah melalui peningkatan jaringan jalan yang memiliki trayek angkutan, meningkatkan sarana prasarana perhubungan, meningkatnya kualitas perlengkapan lalu lintas, meningkatnya manajemen lalu lintas serta meningkatnya teknologi dalam smart transportasi;

i. Mendorong penyediaan infrastruktur TIK bagi masyarakat pedesaan;

j. Mengkoneksikan kantong – kantong produksi dengan pasar/distribusi *channel*;

2. Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

a. Mengedepankan upaya-upaya peningkatan kualitas lingkungan dalam pembangunan Kabupaten Kendal;

b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengujian kualitas air, udara, penanganan sampah, pengelolaan keaneragaman hayati

c. Mendorong Kabupaten Kendal menjadi berketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim;

d. Meningkatkan ketahanan daerah dalam penanganan bencana melalui peningkatan kualitas perencanaan penanganan bencana, peningkatan *early warning system*, dan peningkatan prasarana penanganan bencana.

3. Peningkatan perekonomian berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam;

a. Peningkatan kualitas industri pengolahan melalui pengembangan industri kecil, fasilitasi ijin usaha dan penataan sentra industry dengan potensi lokal;

b. Peningkatan kontribusi pariwisata dalam pendapatan daerah melalui pengembangan destinasi wisata yang sudah ada, penguatan dan

pembentukan desa wisata berbasis potensi local dan peningkatan promosi pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan pariwisata;

c. Meningkatkan kualitas sektor pertanian melalui pengembangan bibit unggas, tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan, peningkatan prasarana pertanian yang mendorong produksi pertanian serta meningkatkan kapasitas petani;

d. Peningkatan produksi perikanan melalui peningkatan kapasitas nelayan, pengembangan budidaya perikanan, peningkatan kapasitas pengolah ikan;

e. Peningkatan kualitas perdagangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor, penataan izin pelaku usaha, peningkatan kualitas pasar, dan penataan PKL serta perlindungan terhadap konsumen;

f. Peningkatan pelayanan penanaman modal melalui peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan insentif investor dan promosi penanaman modal;

g. Meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan, keanekaragaman pangan, distribusi pangan serta peningkatan konsumsi yang bergizi dan seimbang;

h. Penurunan tingkat pengangguran melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja, penciptaan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan permintaan investor di kawasan industri, peningkatan produktivitas tenaga kerja;

i. Peningkatan kualitas usaha mikro melalui pengembangan usaha mikro, pembinaan usaha mikro dan penguatan koperasi dalam membantu permodalan usaha mikro serta digitalisasi marketing;

4. Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep *Smart City*

a. Peningkatan birokrasi yang akuntabel melalui peningkatan kualitas perencanaan, meningkatkan proses partisipasi dengan meningkatkan

peran RT/RW dalam musrenbang, pelaksanaan pembangunan, penanganan dan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas APBD;

b. Peningkatan birokrasi yang kapabel pada peningkatan profesionalisme ASN melalui peningkatan kualitas, kinerja dan kedisiplinan ASN;

c. Peningkatan birokrasi yang kapabel melalui peningkatan pembangunan berbasis elektronik, mendorong optimalisasi *e- planning, e- monitoring, emusrenbang, e-services, e-budgeting* sebagai alat untuk mendorong pembangunan terintegrasi, peningkatan kualitas 1 data dan mendorong keamanan arsip daerah serta kualitas persandian;

d. Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kecepatan pelayanan, mengurangi pungli dan peningkatan sarana prasarana pelayanan.

5. Optimalisasi SDM di Kabupaten Kendal yang berdaya saing, berkarakter, dan Handal

a. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui penyelenggaraan beasiswa pada penduduk miskin, pengembangan kesetaraan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta pengembangan sekolah sesuai dengan protocol kesehatan;

b. Pemajuan budaya melalui peningkatan pelestarian budaya baik benda maupun tak benda

c. Peningkatan literasi pada masyarakat melalui peningkatan kualitas perpustakaan dan peningkatan minat baca;

d. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan fasilitas, layanan kesehatan yang mudah diakses sesuai dengan SPM, penyediaan kualitas tenaga kesehatan, penyediaan kebutuhan farmasi di pelayanan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;

e. Peningkatan kualitas kesehatan melalui pengendalian jumlah penduduk, dan peningkatan peserta KB;

- f. Peningkatan peran pemuda dan olahraga melalui peningkatan prestasi pemuda dan olahraga;
- g. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender melalui peningkatan PUG di semua perangkat daerah, peningkatan perlindungan perempuan dari kasus kekerasan, dan perdagangan, peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep Kabupaten layak anak dan perlindungan anak khusus.

Disamping program prioritas diatas, Kabupaten Kendal juga melaksanakan pembangunan yang bersifat mainstreaming yaitu pembangunan gender, stunting dan kemiskinan. Isu gender tidak hanya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan saja, tetapi dilaksanakan oleh hampir semua Perangkat Daerah. Penyelesaian kesetaraan dan keadilan gender dilakukan berdasarkan isu gender di masing-masing Perangkat Daerah dengan tidak mengubah struktur anggaran.

Isu stunting juga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana rencana aksi penanggulangan stunting. Penyebab terjadinya stunting dari ekonomi, sosial dan infrastruktur yang perlu juga mendapat dukungan dari Dana Desa.

Isu kemiskinan diselesaikan oleh banyak Perangkat Daerah. Dalam rangka penyelesaian kemiskinan akan diselaraskan dengan dokumen Rencana Penanganan Kemiskinan Daerah.

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Gemuh Tahun 2025 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam Renja Kecamatan Gemuh tahun 2025 apabila disandingkan dengan kebijakan Pusat dan Provinsi diuraikan pada Tabel 3.1, sebagai berikut :

Tabel 3.1. Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2025

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Pembangunan Kab. Kendal	Program/kegiatan dalam Renja 2025
Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi , Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi,dan Penyelundupan Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Meningkatkan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal <i>Smart City</i>	✓ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupatn/Kota ✓ Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ✓ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ✓ Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum ✓ Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ✓ Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka menyelenggarakan Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih

dan baik, yaitu Pemerintahan yang berpandangan jauh kedepan (*visioner*), demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, profesional, partisipatif, responsif, serta memiliki komitmen yang tinggi dalam meminimalisir di berbagai kesenjangan yang terjadi dan membangun mindset birokrasi sebagai Aparatur Sipil Negara yang mempunyai komitmen melayani dengan sebaik – baiknya. Maka sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dimana pada tahun-tahun mendatang Kecamatan diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di semua bidang sebagaimana rencana yang sudah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran Kecamatan Gemuh mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Kendal yang tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Kecamatan Gemuh bertanggungjawab atas pelaksanaan misi 5 yaitu **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.**

Sejalan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal tersebut, tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GEMUH TAHUN 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	skor	89

		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	skor	75
--	--	------------------------------------	-------------	------	----

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan diselenggarakan oleh Kecamatan Gemuh diarahkan untuk mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kendal. Guna mewujudkan strategi yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan untuk memperlancar mewujudkan arah kebijakan Perangkat Daerah. Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

a) *Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisaa Realisasi Kinerja SKPD

b) *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;*

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

c) *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

1. *Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya*

d) *Administrasi Umum Perangkat Daerah;*

1. Penyediaan Komponen Instalasi;
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - e) *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 1. *Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*
 - f) *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 1. Penyediaan Jasa Surat menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g) *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

2. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
3. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

- a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

- b) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Gemuh Tahun 2025 dan Prakiraan maju Tahun 2025 akan disajikan pada tabel T-C. 33 sebagai berikut :

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Gemuh

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	9	11		15	16
					KECAMATAN GEMUH				2.996.089.223,00				0,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.996.089.223,00				0,00
7	01				KECAMATAN				2.996.089.223,00				0,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase unit kerja yang terlayani		100 %	2.800.658.623,00			100 %	0,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran yang tersusun		8 dokumen	7.662.000,00			-	0,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		12 Dokumen	3.962.000,00				0,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	12 Laporan	3.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00

7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	2.285.869.893,00			-	0,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	17 Orang/bulan	2.285.869.893,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			0,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			17 Paket	18.300.000,00			-	0,00
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	17 Paket	18.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	210.143.600,00			-	0,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	1 Paket	1.934.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	2 Paket	36.351.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	2 Paket	28.751.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	50 Paket	44.885.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	12 Paket	6.675.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	12 Dokumen	1.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa	12 Laporan	85.052.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00

7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	12 Dokumen	4.695.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset yang diadakan		16 bh	45.982.500,00			-	0,00
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	1 Unit	45.982.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor		12 bulan	174.505.000,00			-	0,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	12 Laporan	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	12 Laporan	40.825.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	12 Laporan	2.540.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	12 Laporan	128.640.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis aset yang dipelihara		6 buah	58.195.630,00			-	0,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	12 Unit	31.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	20 Unit	8.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00

7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	2 Unit	18.995.630,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		-	9.000.000,00			-	0,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-		-	800.000,00			-	0,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	12 Laporan	800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-		-	8.200.000,00			-	0,00
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	12 Dokumen	8.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-		-	52.291.800,00			-	0,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-		-	52.291.800,00			-	0,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	1 Lembaga Kemasyarakatan	1.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00

7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	12 Dokumen	33.445.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	12 Laporan	17.246.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani		100 %	107.812.000,00			100 %	0,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah koordinasi yang dilaksanakan		12 kali	13.132.000,00			-	0,00
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	12 Laporan	13.132.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah koordinasi yang dilaksanakan		12 kali	94.680.000,00			-	0,00
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	12 Laporan	94.680.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Prosentase tercapainya kegiatan bimtek		100 %	9.126.800,00			100 %	0,00

					UMUM								
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase terpenuhinya Koordinasi dan Bimtek		100 %	9.126.800,00			-	0,00
7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45 Orang	9.126.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase kasus konflik sosial yang di tangani		100 %	17.200.000,00			100 %	0,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kasus konflik yang ditangani dibagi kasus konflik yang terjadi		12 Laporan	17.200.000,00			-	0,00
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	12 Dokumen	17.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00
JUMLAH									2.996.089.223,00				0,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2025 serta Review Renstra Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Tahun 2024-2026;
2. Mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 - 2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian pengembangan inovasi dan pengendalian daerah, serta infrastruktur pengembangan wilayah dalam kerangka pembangunan daerah Kabupaten Kendal;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan;
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Tahun 2025 sebagaimana Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kecamatan Gemuh

Nama OPD : Kecamatan Gemuh

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						KECAMATAN GEMUH						2.996.089.223,00							0,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.996.089.223,00							0,00		
	7	01				KECAMATAN						2.996.089.223,00							0,00		
	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Prosentase unit kerja yang terlayani	100 %			100 %	2.800.658.623,00						100 %	0,00		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun	-			8 dokumen	7.662.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN/ PNS Kecamatan Gemuh	-	0,00		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					12 Dokumen	3.962.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN/ PNS Kecamatan Gemuh		0,00	KECAMATAN GEMUH	
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	3.700.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN/ PNS Kecamatan Gemuh		0,00	KECAMATAN GEMUH
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.285.869.893,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	ASN/ PNS Kecamatan Gemuh	-	0,00	
																Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani				
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					17 Orang/bulan	2.285.869.893,00	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN/ PNS Kecamatan Gemuh		0,00	KECAMATAN GEMUH
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercukupinya pakaian dinas beserta kelengkapannya	-			17 Paket	18.300.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN/ PNS Kecamatan Gemuh	-	0,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				17 Paket	18.300.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN/ PNS Kecamatan Gemuh		0,00	KECAMATAN GEMUH
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	210.143.600,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN Kec. Gemuh	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.934.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN Kec. Gemuh		0,00	KECAMATAN GEMUH
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	36.351.400,00	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN Kec. Gemuh		0,00	KECAMATAN GEMUH
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					2 Paket	28.751.200,00	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN Kec. Gemuh		0,00	KECAMATAN GEMUH
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					50 Paket	44.885.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN Kec. Gemuh		0,00	KECAMATAN GEMUH
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	6.675.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN Kec. Gemuh		0,00	KECAMATAN GEMUH
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN Kec. Gemuh		0,00	KECAMATAN GEMUH

	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	85.052.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN Kec. Gemuh		0,00	KECAMATAN GEMUH
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	4.695.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN Kec. Gemuh		0,00	KECAMATAN GEMUH
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset yang diadakan	-			16 bh	45.982.500,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN / PNS Kec. Gemuh	-	0,00	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	45.982.500,00	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan	ASN / PNS Kec. Gemuh		0,00	KECAMATAN GEMUH

															Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani				
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	-			12 bulan	174.505.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN Kec. Gemuh	-	0,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.500.000,00		Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN Kec. Gemuh		0,00	KECAMATAN GEMUH
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	40.825.000,00		Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN Kec. Gemuh		0,00	KECAMATAN GEMUH
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.540.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN Kec. Gemuh		0,00	KECAMATAN GEMUH	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	128.640.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN Kec. Gemuh		0,00	KECAMATAN GEMUH	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis aset yang dipelihara	-			6 buah	58.195.630,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN/ PNS Kecamatan Gemuh	-	0,00		
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	31.000.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN/ PNS Kecamatan Gemuh		0,00	KECAMATAN GEMUH	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	8.200.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN/ PNS Kecamatan Gemuh		0,00	KECAMATAN GEMUH
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	18.995.630,00	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN/ PNS Kecamatan Gemuh		0,00	KECAMATAN GEMUH
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	9.000.000,00						-	0,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	800.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, dan Perangkat Desa	-	0,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	800.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, dan Perangkat Desa		0,00	KECAMATAN GEMUH
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-		-	8.200.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat Umum dan Kelompok UMKM dan Perangkat Desa	-	0,00	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha													
						Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	8.200.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat Umum dan Kelompok UMKM dan Perangkat Desa		0,00	KECAMATAN GEMUH
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-		-	52.291.800,00						-	0,00	

	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	52.291.800,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, UMKM dan Perangkat Desa	-	0,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					1 Lembaga Kemasyarakatan	1.600.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, UMKM dan Perangkat Desa		0,00	KECAMATAN GEMUH
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					12 Dokumen	33.445.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, UMKM dan Perangkat Desa		0,00	KECAMATAN GEMUH
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					12 Laporan	17.246.800,00	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, UMKM dan Perangkat Desa		0,00	KECAMATAN GEMUH

4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100 %			100 %	107.812.000,00						100 %	0,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	-			12 kali	13.132.000,00				Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel dan melayani	Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, dan Perangkat Desa	-	0,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan															
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	13.132.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel dan melayani	Masyarakat Umum dan Kelompok, Lembaga Desa, dan Perangkat Desa		0,00	KECAMATAN GEMUH		
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	-			12 kali	94.680.000,00				Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel dan melayani	Tenaga Penunjang Kecamatan (LINMAS PAM OBVIT) dan Masyarakat Umum	-	0,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia															

							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	94.680.000,00	Kab. Kendal, Gemuh, Gemuhblanten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Tenaga Penunjang Kecamatan (LINMAS PAM OBVIT) dan Masyarakat Umum		0,00	KECAMATAN GEMUH
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase tercapainya kegiatan bimtek	100 %			100 %	9.126.800,00						100 %	0,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase terpenuhinya Koordinasi dan Bimtek	-		100 %	9.126.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN/ PNS, Perangkat Desa dan Masyarakat	-	0,00		
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				45 Orang	9.126.800,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN/ PNS, Perangkat Desa dan Masyarakat		0,00	KECAMATAN GEMUH	
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Prosentase kasus konflik sosial yang di tangani	100 %			100 %	17.200.000,00						100 %	0,00	

BAB V

PENUTUP

Renja Kecamatan Gemuh Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Gemuh di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Didalam Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Gemuh diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal;
2. Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra Kecamatan Gemuh Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja.
3. Penyusunan Renja Kecamatan Gemuh ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

a. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Gemuh Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Gemuh ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gemuh Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Kendal. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Kendal;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Gemuh Tahun 2025.

b. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2025, Kecamatan Gemuh menetapkan Rencana Tindak Lanjut sbb :

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dengan fokus kinerja aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan pada Kecamatan Gemuh;
2. Peningkatan pengetahuan , ketrampilan dan sikap aparatur desa
3. melalui pembinaan SDM dan kelembagaan/administrasi diprioritaskan kepada Aparatur desa yang kurang memahami tugas dan fungsi.
4. Peningkatan intensitas koordinasi antar dinas / instansi, UPTD/UPTB dan desa diprioritaskan kepada program bersama dalam pembangunan, keamanan, kesejahteraan.
5. Peningkatan pelaksanaan kewenangan Bupati kepada Camat diprioritaskan

Demikian Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal tahun 2026 dan dapat menjadi pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran pada Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.



NIP. 197807041997031002